

## Peran Dinas Pariwisata Kota Gorontalo Dalam pengembangan Pariwisata Dimasa Pandemi Covid-19

### The Role Of The Gorontalo City Tourism Office In The Development Of Tourism During The Covid-19 Pandemic

**Fachri Ahmad<sup>1</sup>, Arman<sup>2</sup>, Swastiani Dunggio<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia  
Email: fachriahmat27@gmail.com, armanfisip@gmail.com, swastianidunggio@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Gorontalo terkait pengembangan pariwisata dimasa pandemic covid 19. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil peneltian adalah Peran Dinas Pariwisata Gorontalo dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19 dengan tersedianya wirausahawan (Operator) Koordinator, fasilitator dan stimulan masih terdapat kekurangan yang belum dilaksanakan oleh koordinator dan fasilitator dengan baik. Analisis terhadap langkah-langkah yang di lakukan dinas pariwisata kota gorontalo, dapat dijelaskan dimana juga telah turut berperan aktif mendukung pengembangan wisata. Dinas pariwisata kota gorontalo ikut memaksimalkan potensi pariwisata yang ada dengan membentuk lembaga khusus yang berfokus pada sektor pariwisata, mengatur sumber daya yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata, distribusi manfaat berupa pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata, memfasilitasi pengembangan wisata serta meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dengan pelatihan-pelatihan keterampilan.

**Kata Kunci : peran; pengembangan pariwisata; covid 19.**

#### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the role of the Gorontalo City Tourism Office Government regarding tourism development during the COVID-19 pandemic. The method used is a descriptive research method that uses a qualitative approach. The results of the research are the role of the Gorontalo Tourism Office in tourism development during the covid-19 pandemic with the availability of entrepreneurs (Operators) Coordinators, facilitators and stimulants, there are still shortcomings that have not been carried out by the coordinators and facilitators properly. Analysis of the steps taken by the Gorontalo City Tourism Office, it can be explained that they also play an active role in supporting tourism development. The Gorontalo City Tourism Office has participated in maximizing the existing tourism potential by forming a special institution that focuses on the tourism sector, managing potential resources to be developed into tourist attractions, distributing benefits in the form of revenue sharing from the tourism sector, facilitating tourism development and improving local community skills by skills training.*

**Keywords: role; tourism development; covid 19.**

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan beragam budaya dan tradisi yang dapat menjadi penyumbang sektor pariwisata. Pariwisata telah menjadi industri terbesar dan terus berkembang setiap tahun.

Menjelang wabah Covid-19, Organisasi Pariwisata Dunia memperkirakan pada tahun 2020 jumlah kedatangan wisatawan global akan meningkat 200%.

Pariwisata modern sedang dipercepat oleh proses globalisasi dunia. menyebabkan koneksi antar cabang internasional dan antara orang-orang yang hidup di dunia. Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat dinamika globalisasi global, termasuk perkembangan dunia hiburan, rekreasi dan pariwisata (Utama, 2014:1). Namun, di masa pandemi Sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan. yaitu sekitar 44% pada awal Februari. 69 dari 217 atraksi dunia, atau 32%, sepenuhnya tertutup untuk pariwisata internasional. Dari jumlah tersebut, 30 di Asia dan Pasifik, 15 di Eropa dan 11 di Afrika. Angka itu turun dari puncaknya pada Mei 2020, ketika 75% destinasi wisata global ditutup total. Namun angka itu naik lagi sejak November ditutup 27%.

Hanya di Indonesia Wabah covid-19 Selama enam bulan telah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terkontraksi cukup kuat sebesar -5,32% jika pertumbuhan ekonomi triwulan III kembali mengalami kontraksi. Indonesia pasti akan memasuki resesi. Sejumlah industri mengalami kerugian akibat wabah SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, China akhir tahun lalu. termasuk industri pariwisata.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat hingga April 2020, total kerugian industri pariwisata Indonesia mencapai Rp 85,7 triliun. Ribuan hotel dan restoran terpaksa ditutup. serta sejumlah maskapai penerbangan dan operator tur yang mengalami kerugian. Dalam obrolan online awal bulan ini Deputi Gubernur Destinasi dan Pengembangan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Hari Santosa Sungkari memperkirakan jumlah wisman ke Indonesia akan tertahan di angka 4 juta. Bahkan Bali yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara harus menutup pintu bagi wisatawan asing, sampai akhir tahun Untuk mencegah penyebaran virus corona di tanah air Pulau Dewata juga mencatatkan kerugian pariwisata sebesar 9,7 triliun rupiah setiap bulannya.

Pertanyaannya adalah pariwisata di Provinsi Gorontalo, khususnya di Gorontalo. Mampukah bertahan di masa pandemi ini? Pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata memegang peranan dan tanggung jawab penting dalam meningkatkan sektor pariwisata. Pemerintah telah meningkatkan pariwisata, mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengembangkan pariwisata itu sendiri, sehingga semakin sedikit pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kota Gorontalo memiliki pariwisata yang masih harus dikembangkan diantaranya: Benteng Otanaha, Taman Lahilote, Monumen Nani Wartabone, Taman Wisata Tangga 2000, dan Pantai Kurenai. Pengembangan Pariwisata Kota Gorontalo dan sekitarnya dikembangkan menjadi pariwisata perkotaan dengan pengembangan fasilitas pariwisatanya ini tertuang dalam perturan Propinsi Gorontalo (Perda Propinsi Gorontalo No 2, 2019)

Dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan: Melestarikan, mengembangkan, dan melestarikan kekayaan nasional tempat wisata dan kekayaan yang belum terjamah (UU RI Nomor 10, 2009). Dalam kenyataannya tentang pelestarian obyek wisata masih banyak obyek-obyek wisata yang secara tidak langsung kita tidak sadari sudah jarang tersentuh oleh pemerintah banyak fasilitas-fasilitas yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi padahal banyak cara untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah rusak untuk dipergunakan kembali oleh wisatawan atau masyarakat lokal. Seharusnya obyek wisata ini menjadi suatu tolak ukur atau sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun international yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Dinas Pariwisata Gorontalo dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi covid 19.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi. Kualitatif deskriptif yaitu untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sejalan dengan penelitian (Kamaludin, Arman, & Dunggio, 2021; Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, 2021; Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021 Anugrah & Sudarmayasa, 2017). Metode ini juga tidak dimaksudkan untuk menguji beberapa asumsi, tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan tujuan penelitian. Peneliti ini berfokus pada peran Dinas Pariwisata Gorontalo dalam pengembangan pariwisata, terutama di masa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) melalui pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah itu peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi, karena dalam penelitian ini teknik wawancara dan observasi sangat cocok untuk penelitian kualitatif, setelah seluruh data dan informasi itu telah di kumpulkan, lalu di analisa datanya di mulai dari menelaah keseluruhan data yang telah terkumpul, kemudian di tarik kesimpulanya secara induktif atau proses pembuktian (Sugiyono, 2018).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dari informasi yang dikumpulkan peran Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemuda dalam pengembangan pariwisata selama wabah Covid-19 akan dibahas, dioperasikan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo peran badan tersebut adalah mencoba mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pariwisata di Gorontalo.

Peran Dinas Pariwisata dan Olahraga Pemuda adalah suatu proses atau kegiatan yang berbentuk wirausaha. (Operator) Koordinator, fasilitator dan stimulan dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara yang efisien dan efektif dalam pembahasan manajemen pengembangan pariwisata akan digunakan tentang peran Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, dalam pengembangan pariwisata pada masa pandemi Covid-19. Proses peran pelayanan ini diawali dengan proses inisiasi operator, dimana proses ini merupakan proses persiapan tindakan, dilanjutkan dengan koordinator, kemudian fasilitator, dan diakhiri dengan simulator. Ini merupakan langkah terakhir dan juga digunakan sebagai proses untuk menilai peran Dinas Pariwisata Gorontalo dalam pengembangan pariwisata. Dari hasil pendataan hasil penelitian yang dipublikasikan yaitu beberapa fungsi Dinas Pariwisata Gorontalo dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

#### 1. Wirausaha (*entrepreneur*),

Sebagai jiwa wirausaha Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk kepentingan bisnis. Pemerintah daerah dapat menguasai tanah atau bangunan untuk tujuan konservasi atau lingkungan hidup lainnya, juga dapat digunakan untuk tujuan perencanaan pembangunan atau untuk tujuan ekonomi lainnya.

Ini merupakan peluang untuk berkarya bagi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi perekonomian sekitar, penting untuk pengembangan pariwisata. Selama wabah Covid-19 di Dinas Pariwisata Kota Gorontalo dalam pengembangan pariwisata. Karena potensi wisata Gorontalo masih sulit ditemukan di Gorontalo dan digandrungi banyak wisatawan. Pariwisata di Gorontalo adalah wisata alam dan wisata budaya. Demikian disampaikan kabid Disparpora Kota Gorontalo.

*“Potensi di kota Gorontalo ada beberapa potensi alam Budaya tidak hilang dari dasar itu. Kami optimis di kota gorontalo dapat berkembang lebih jauh kalau berkaitan pariwisata (wawancara 15 mei 2021)”.*

Hal senada juga disampaikan sekertaris Dinas.

*“Dengan berbagai budaya termasuk keramahan Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah ingin membangun wisata kelurahan budaya melalui budaya Gorontalo. (wawancara 17 Mei 2021)”.*

Masyarakat perkotaan juga menularkan hal yang sama.

*“Kota Gorontalo memiliki banyak potensi alam dan budaya yang masih kuat pak. Makanya pemerintah daerah ingin mengembangkan pariwisata di kota ini sesuai visi dan misi pak wali. (wawancara 16 Mei 2021)”.*

Program pengembangan pariwisata di Gorontalo bertujuan untuk mendorong, mensejahterakan perekonomian, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Gorontalo. Perencanaan adalah kegiatan yang dimulai dengan menguraikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan rencana strategis organisasi. Perencanaan pengembangan pariwisata di Gorontalo diawali dengan analisis potensi wisata. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah kegiatan yang pertama dalam analisis potensi oleh Bappeda, Disparpora, dan lain-lain. OPD atau lembaga lainnya yang terkait. Seperti yang dikatakan Kepala Disparpora bahwa:

*“Akan kami analisa terlebih dahulu bersama Bappeda dan tim lainnya. Dianalisa potensi wisata apa saja yang ada di kota Gorontalo yang belum terekspos. Khususnya potensi wisata budaya terutama peninggalan Belanda. Karena peninggalan Belanda ini sangat potensial. (wawancara 15 Mei 2021)”.*

Warga Gorontalo juga menyebut hal yang sama:

*“Bappeda dan dinsbudparpora pertama, mari kita analisis dulu. apa potensinya? dan kembangkan apa saja di sini. (wawancara, 16 Mei 2021)”.*

Potensi-potensi tersebut yaitu peninggalan Belanda dan wisata kuliner malam seperti tangga 2000, aliran sungai yang perbatasan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, rumah adat dan sebagainya.

## **1. Koordinator**

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan di daerahnya. Rencana pengembangan pariwisata daerah atau rencana pengembangan ekonomi daerah yang dikembangkan di wilayah tertentu. Ini mencerminkan kemungkinan pendekatan perencanaan sebagai kesepakatan antara pemerintah, bisnis dan kelompok masyarakat lainnya.

Koordinator Organisasi tersebut bertujuan untuk mengontrol dan membagi kerja antar anggota organisasi Disparpora Kota Gorontalo. Untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata di Gorontalo sebagaimana telah ditetapkan, dalam pengembangan pariwisata di Gorontalo Tugas Dinas Ini hanya sebuah perintah kenyamanan dan membimbing pengelolaan kelompok sadar wisata saja Sedangkan secara teknis Manajemen pembangunan adalah semua tentang pariwisata. Menurut kepala bidang Pariwisata, Disparpora, mengatakan:

*“Sebenarnya misinya lebih kepada komunitas atau pemerhati pariwisata. Karena Dinas hanya mengarahkan pengelolaan kelompok sadar wisata. yang membawahi pariwisata masyarakat atau seluruh pemerhati pariwisata tourism termasuk pendapatan Dinas memberikan Layanan, Fasilitas, mengarahkan, mempromosikan saja. (wawancara 15 Mei 2021)”*

Sekretaris Dinas pariwisata Kota Gorontalo juga menyampaikan hal yang sama:

*“Kepada komunitas atau pemerhati pariwisata yang ada pengurusnya bisa mengelolah wisata yang ada di Kota kami Dinas hanya bias mengarahkan atau Guiding and Coaching. (wawancara 17 Mei 2021)”*.

Kepada masyarakat atau pemerhati pariwisata yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan pengelolaan pariwisata di Kota Gorontalo. Koordinasi terus dilakukan mengingat ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Gorontalo. Termasuk masyarakat atau pemerhati pariwisata atau kelompok kesadaran pariwisata yang ada dalam koordinasi Komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar. Komunikasi antara operator pembangunan diperlukan untuk mengkoordinasikan tujuan.

Komunikasi yang muncul dalam perkembangan pariwisata adalah komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal berlangsung dalam jajaran struktural dengan laporan dan perintah dari atasan ke bawahan. Komunikasi horizontal dapat berupa interaksi dan transfer informasi dan informasi, sehingga komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap koordinasi.

Kepala bidang pariwisata Disparpora Kota Gorontalo memberikan penjelasan mengenai koordinasi dilapangan:

*“karena komunitas atau pemerhati pariwisata penanggungjawab kegiatan wisata di Kota Gorontalo sebenarnya, koordinasi dilakukan melalui komunitas atau pemerhati pariwisata, dinas datang ke tempat itu, berkomunikasi dengan komunitas atau pemerhati pariwisata. jika akan ada bantuan dana dinas minta komunitas atau pemerhati pariwisata membuat proposal terus dirapatkan sama dikasih ke dinas, jadi Disparpora hanya memberi pengarahan, pembinaan dan juga fasilitator. (wawancara, 15 mei 2021)”*.

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat menyatakan:

*“komunitas atau pemerhati pariwisata itu membentuk kelompok untuk mengelola, tapi dibawah naungan pemerintah dan Disparpora. (wawancara 18 mei 2021)”*.

Ketua komunitas atau pemerhati pariwisata juga menyatakan:

*“Dari pengembangan pariwisata akan menunjukan Kota Gorontalo wisata releji lebih di kenal lagi secara luas. (wawancara 17 mei 2021)”*

Mengingat beberapa teks di atas Dapat dilihat bahwa otoritas pengendali yang tinggi adalah kota. Disparpora Gorontalo, dimana sektor utama beroperasi adalah sektor pariwisata, sebagai Kepala Disparpora kota Gorontalo mengatakan.

*“Kendalanya ya lebih ke ego misal si jokodwi ketua pemerhati pariwisata dia awalnya penanggung jawab ke tubing. dia kadang-kadang malah tidak focus pada wisata lainnya anggotanya juga masih kurang semangat. (wawancara 15 mei 2021)”*

Hal lain dipaparkan oleh Ketua komunitas atau pemerhati pariwisata kota Gorontalo yang menyatakan:

*“Sebenarnya kalau saya si hambatannya cuma satu ya dari masyarakat kurang akan kesadaran tentang desa wisatanya sehingga sulit untuk membagi tugas. (wawancara 16 mei 2021)”*

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa aktor utama dalam pengelolaan pembangunan pariwisata di Gorontalo adalah sektor pariwisata. Penyelenggaraan kegiatan kurang baik mengingat hambatan yang muncul dalam pembagian kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

## **2. Fasilitator**

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dengan memperbaiki perilaku lingkungan di daerahnya. Peran ini mungkin termasuk meningkatkan proses pembangunan, perbaikan proses perencanaan dan menetapkan aturan yang ada adalah bagian penting dari proses manajemen. Karena mereka berkaitan erat dengan individu yang ada dan terkait dengan organisasi.

Dalam hal ini mobilisasi bertujuan agar masyarakat mau bekerja sehingga tercapai upaya pengorganisasian. Faktor pendorong pertama adalah perilaku manusia. Disparpora mereka kurang tertarik dengan pengembangan pariwisata di Gorontalo, karena mereka melihat antusiasme masyarakat yang kurang aktif dan kurang kompak dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Gorontalo. Kepala bidang Pariwisata Dinbuparpora:

*“kita Dinas semangat kalau masyarakat Kota Gorontalo semangat lah masyarakatnya aja ada yang tidak setuju, ada yang kerjanya setengah itu ada. tapi dilain Kota Gorontalo itu ada yang semangat. seperti contohnya panusunan, mereka kompak ya ada kekompakan jadi ya kita semangat. jadi egonya. lebih ke ego”.(wawancara 15 mei 2021)*

Selanjutnya bergerak adalah aspek motivasi. Setiap orang membutuhkan motivasi untuk memotivasi mereka untuk bekerja lebih aktif dengan sepenuh hati. Dalam menggerakkan motivasi maka perlu adanya kegiatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata. Hal ini dikatakan oleh kepala pariwisata. Disparpora Kota Gorontalo:

*“kita juga mengadakan peningkatan sdm tertuama untuk kelompok sadar wisata, ada pelatihan-pelatihan dan pemberian motivasi”.(wawancara 15 mei 2021)*

Aspek dari penggerakan yang selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja dari pelaku pariwisata. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Kota Gorontalo.

*“Harapannya kita sebenarnya di kota gorontalo itu kan pemerintahnya tapi kembali pada kesifat kepemimpinan pada masing-masing apakah mereka bisa menggerakkan masyarakat semua atau tidak. kalau dari Dinas mau menggerakkan semua warga tapi yang punya warganya yang mensosialisasikan, tapi belum maksimal menurut saya. beda dengan kota gorontalo lain yang sosialisasi di setiap rt jadi kalau ada wisatan yang datang warganya ramah dan tidak mengganggu”.( wawancara 15 mei 2021)*

Hal di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja. Hal ini terlihat dengan memupuk tanggung jawab para anggota pengembangan pariwisata yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Aspek mobilisasi selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi resmi selesai, komunikasi dilakukan secara resmi, pidato resmi Agenda Adanya pertemuan dalam acara-acara pelatihan maupun pertemuan yang membahas sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota gorontalo Indikator terakhir yaitu hubungan manusia antar pelaksana pengembangan pariwisata di kota gorontalo. Hubungan ini bersifat formal karena terikat pada birokrasi dan garis structural pada organisasi. Hal ini dilihat dari tingkat pertanggungjawab tugas masing-masing. Bentuk kegiatan dari hubungan ini adalah membantu melakukan promosi dan memberi pelatihan-pelatihan, seperti pernyataan yang terlihat dibawah ini oleh Kepala Bidang Parwisata Disparpora Kota Gorontalo:

*“Jadi biasanya kita menggerakkan untuk promosi juga ya dengan promosi nyatanya sudah banyak wisatawan yang datang. terus menggerakkan dengan melalui kampanye satwa pesona sadar wisata kemarin kita cek di aksi sadar wisata di goa lawa kita undang propinsi untuk dia ikut bimbingan disitu, kita juga member berbagai macam pelatihan”. (wawancara 15 mei 2021)*

Promosi juga merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, dalam upaya mengembangkan pariwisata di Gorontalo. Ada beberapa promosi yang dijalankan oleh Disparpora Kota Gorontalo, seperti promosi dengan membuat website Bantu promosikan media online Buat video profil konsumsi iklan YouTube dengan mengadakan acara famtrip (wisata keluarga), mengundang biro wisata, pelaku wisata, dan mengundang publikasi.

Promosi yang paling efektif digunakan dalam mempromosikan pariwisata di Kota Gorontalo yaitu dengan media cetak, seperti pernyataan yang terlihat dibawah ini oleh Kepala Bidang Parwisata Disparpora Kota Gorontalo:

*“Selain itu juga mempromosikan dengan cara membuat website, terus membantu mempromosikan dengan media online tahun ini membuat video profil untuk konsumsi iklan di youtube selain itu juga ada famtrip family action trip mengundang biro wisata pelaku wisata wartawan juga media cetak datang ke desa, biasanya yang sering kita pake si media cetak..” (wawancara 15 mei 2021).*

Uraian ini menunjukkan bahwa mobilisasi yang berlangsung adalah penanaman rasa tanggung jawab kepada setiap anggota dan pelaku pembangunan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab melalui pelatihan yang diterimanya, pelatihan safety untuk wisata yang rutin



dilakukan setiap bulannya berkerjasama pihak terkait, karena kota Gorontalo potensi wisatanya cukup menjanjikan pelatihan keluar Metode panduan membuat souvenir dan pelatihan

### 3. Stimulator

Pemerintah daerah dapat merangsang pembangunan dan pengembangan bisnis melalui tindakan khusus yang akan meyakinkan perusahaan untuk masuki area tersebut dan pertahankan perusahaan yang ada di area tersebut. Berbagai jenis fasilitas dapat disediakan. Untuk menarik pengusaha dalam pariwisata pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan tertentu di objek wisata tertentu.

Wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata antara lain didorong oleh keinginan untuk mengenal, mengetahui atau mempelajari kondisi disuatu daerah atau kebudayaan masyarakat di wilayah yang ditujui selama berada didaerah tujuan wisata, wisatawan pasti akan berinteraksi dengan masyarakat pesisir, bukan saja dengan mereka yang secara langsung melayani kebutuhan wisatawan melainkan juga dengan masyarakat secara luas. (Fernando, 2016)

Simulator dibuat untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan terpenuhi. Gunakan simulator secara langsung dan tidak langsung. Simulator langsung digunakan untuk mengetahui secara langsung hasil dari suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Simulator ini dibuat oleh pemimpin sendiri. Dalam hal ini atasan akan segera datang dan mengecek kegiatan yang dilakukan bawahan. Simulator ini berupa *review* langsung. Simulator dioperasikan oleh Dinbudparpora Sebulan sekali, terkadang simulator tidak selalu datang mengunjungi, wisatawan bisa berkunjung. Simulator dapat mengirim orang untuk mengevaluasi layanan layanan yang disediakan oleh dinas terkait. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Disparpora Kota Gorontalo.

*“Simulator tidak selalu datang langsung ke tempatnya. Bisa dengan turis. Ia bahkan dapat mengirim orang untuk menilai dari sisi layanan. Ini adalah layanan yang dilihat dari departemen koordinasi”.*(wawancara Mei 2021).

Simulator tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh simulator ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupun lisan. Bentuk dari pertanggungjawaban ini berupa laporan pelaksanaan dana, laporan pemasukan dana, dan laporan kunjungan. Laporan pelaksanaan dana yaitu laporan penggunaan dana yang diberikan oleh DPPKAD yang berisi rekapitulasi penggunaan dana dalam proses pengembangan. Penggunaan dana merupakan kegiatan yang diawasi oleh DPPKAD dan pihak inspektorat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Bidang Pariwisata Dinbudparpora kota Gorontalo:

*“Simulator atau Simulasi penggunaan dana oleh dan Inspektorat Dinas di bawah pengawasan teknis”.* (wawancara Mei 2021).

Selain itu, Dinbudparpora juga mengadakan pertemuan untuk pemerhati pariwisata kota Gorontalo setiap tiga bulan sekali. Dalam pertemuan tersebut, beliau memaparkan keluhan yang disampaikan dan laporan jumlah wisatawan dan kunjungan ke Gorontalo. dan kemajuan masing-masing kecamatan sampai seberapa keberhasilan tersebut.

Pada akhirnya, tingkat keberhasilan datang dari pengembangan pariwisata di Gorontalo. Itu semua tergantung pada jumlah pengunjung. Jika lalu lintas meningkat, itu berarti keberhasilan dalam upaya pembangunan. Tingkat kunjungan menentukan besaran bantuan dana. yang ditegaskan Kepala Disparpora Kota Gorontalo:

*“Indikator keberhasilan tergantung dari jumlah pengunjung. Jika banyak pengunjung berarti banyak sukses. Jika ternyata ada beberapa turis bantuan keuangan kami akan dialihkan ke pariwisata lain”. (wawancara, 15 Mei 2021).*

Proses simulasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam peran pengembangan pariwisata dilakukan dengan audit langsung dan tidak langsung. Dinbudparpora itu bagus mengingat ada pengawasan dadakan dalam mencari layanan dan pengaturan pariwisata di Gorontalo. Jadi pengukuran pelaksanaan dilakukan dengan inspeksi langsung dan laporan tulisan berupa laporan jumlah pengunjung wisata yang dibuat oleh kelompok sadar wisata atau masyarakat peduli Patrawisa, dan inspeksi dari pihak yang berwenang seperti DPPKAD dan inspektorat.

## **B. Pembahasan**

Peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo dalam pengembangan pariwisata dimasa pandemi covid-19 tahapan di dalam pelaksanaannya di mulai dari wirausaha, koordinator, simulator dan fasilitator keseluruhan tahapan ini dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata Kota Gorontalo dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Analisis terhadap langkah-langkah yang di lakukan dinas pariwisata kota gorontalo, dapat dijelaskan dimana juga telah turut berperan aktif mendukung pengembangan wisata. Dinas Pariwisata Kota Gorontalo ikut memaksimalkan potensi pariwisata yang ada dengan membentuk lembaga khusus yang berfokus pada sektor pariwisata, mengatur sumber daya yang potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata, distribusi manfaat berupa pembagian hasil pendapatan dari sektor pariwisata, memfasilitasi pengembangan wisata serta meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dengan pelatihan-pelatihan keterampilan hal ini sejalan dengan penelitian (Pangestuti, 2019).

### **1. Wirausaha**

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk

kepentingan bisnis. Pemerintah daerah dapat menguasai tanah atau bangunan untuk tujuan konservasi atau lingkungan hidup lainnya, juga dapat digunakan untuk tujuan perencanaan pembangunan atau untuk tujuan ekonomi lainnya. Dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyangkut bidang pariwisata diawali melalui proses mendengarkan langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan obyek wisata maupun pemasarannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara langsung maupun melalui rapat terstruktur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama bidang terkait. Data-data yang dikumpulkan biasanya bersifat menyeluruh, yakni melalui pelaku wisata seperti agen perjalanan, pemilik hotel, pengusaha transportasi, pengusaha restoran, kelompok masyarakat pemerhati wisata dan juga masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata. Para stakeholders akan menyampaikan berbagai masalah yang terjadi dan memberikan sumbang saran serta juga kritik kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Data-data yang diperoleh langsung di lapangan ini kemudian diklasifikasi oleh bidang terkait dengan terlebih dahulu memilah dan memilihnya sesuai tingkat kepentingannya. Walaupun tidak melalui sebuah survey yang mendalam, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menganggap bahwa data yang diperoleh ini sudah cukup mewakili dari masalah-masalah yang ada. Jika dianggap perlu, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap masalah yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Proses pengumpulan data tahap awal ini kemudian dikomunikasikan untuk ditindaklanjuti pada proses selanjutnya yaitu proses analisis masalah.

Proses analisis pemecahan masalah ini merangkum keseluruhan aspek-aspek yang kelak akan dijadikan panduan bagi program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karenanya proses ini membutuhkan pengkajian yang mendalam dan komprehensif dari seluruh bidang dan seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebelum diajukan sebagai rencana operasional pada tahun anggaran. Sebagai fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk menerima informasi yang datang dari masyarakat berkenaan dengan program-program yang akan dilaksanakan Tahap selanjutnya dari perencanaan pemecahan masalah ini adalah pembuatan keputusan tentang masalah-masalah apa sesungguhnya yang harus mendapat perhatian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam tahapan ini beberapa alternatif dari masalah yang telah dianalisis kemudian disusun sesuai urutan prioritasnya. Dari beberapa alternatif tersebut, ditetapkan mana masalah yang harus mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti. Penetapan pemecahan masalah ini selanjutnya diserahkan kepada bidang dan seksi sesuai tugas dan pokok fungsinya masing-masing. Pembuatan keputusan ini menjadi penting untuk selanjutnya dikomunikasikan dalam pemasaran obyek wisata Islami. Perencanaan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan proses yang panjang dan kompleks Kegiatan ini dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, analisis masalah dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan

berbagai dampak yang mungkin timbul. Kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar, apalagi menyangkut perilaku dan budaya masyarakat. Oleh karenanya dalam proses perencanaan pemecahan masalah sikap kehati-hatian dan kearifan menjadi pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membuat keputusan dan kebijakan.

## **2. Koordinator**

Dalam menetapkan siapa yang menjadi khalayak sasaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman bahwa setiap calon wisatawan yang dijadikan sebagai target pasar memiliki karakternya sendiri. Oleh karenanya perlu diseleksi dengan melakukan identifikasi. Seleksi dan identifikasi dilihat dari sisi daerah pilihan tujuan wisata, wisatawan mana yang diharapkan datang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tersebut, waktu berkunjung, asal wisatawan, jumlah wisatawan dan gambaran *income* per capita. Faktor lain yang diperhatikan adalah apa yang dapat dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Apakah calon wisatawan merespon apa yang dilakukan atas informasi yang disampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan calon wisatawan yang dijadikan target pasar itu. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan ketersediaan sumber dana. Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya komunikasi kepada sasaran pemasaran objek wisata Islami tidaklah sedikit. Oleh karena itu perlu untuk melakukan segmentasi khalayak. Segmentasi khalayak ini dianggap lebih tepat untuk berfokus pada jumlah segmen yang sedikit, atau mencari cara untuk berbagi dana dengan program-program lain. Kebijakan lain dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perencanaan khalayak sasaran adalah lembaga dan kelompok yang menjadi mitra dalam pemasaran objek-objek wisata. Disadari oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa dengan keterbatasan dana tentu tidaklah mungkin untuk menjangkau semua pihak-pihak yang menjadi pelaku wisata. Oleh karenanya salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui konsep pengembangan jaringan. Pola pengembangan jaringan pariwisata memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis.

Melalui pola pikir ini diupayakan dapat meningkatkan kerjasama antara jenis-jenis usaha pariwisata sebagai suatu kekuatan bersama yang bersinergi dalam membangun pariwisata daerah. Kelompok sasaran lain dari perencanaan khalayak adalah kelompokkelompok sadar wisata, baik yang dibina oleh Pemerintah Gorontalo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun kelompok-kelompok sadar wisata yang tumbuh dan berdiri atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Melalui konsep pembangunan pariwisata berbasis komunitas maka diharapkan peran serta masyarakat secara aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal pada wilayah masing-masing. Pemberdayaan ini dilakukan untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumberdaya serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan pelayanan maksimal pada wisatawan. Melalui pola ini,

diharapkan dapat menjamin adanya pengembangan dan pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan. Perencanaan khalayak sasaran adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasikan khalayak sasaran.

Penting untuk menetapkan urutan prioritas kategori khalayak sasaran, siapa yang menjadi sasaran utama (sasaran primer) dan siapa yang menjadi sasaran antara (sasaran sekunder). Menurut Middleton, analisis ini sangat penting karena bentuk perencanaan akan sangat bergantung pada karakteristik mereka. Bagaimana perilaku komunikasi mereka sehari-hari, apa kesukaan dan ketidaksukaan mereka dalam berkomunikasi. Khalayak perlu dikelompokkan menurut kedekatan ciri di antara mereka. Misalnya jenis profesi, jenis kelamin, kelompok usia dan golongan sosio ekonomi lainnya.

### **3. Simulator**

Proses simulator dalam tujuan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo untuk dikomunikasikan dalam pemasaran objek wisata yang ada, draft awalnya disinkronisasikan dengan usulan-usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Draft ini berisi jawaban terhadap isu-isu yang muncul, kebutuhan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dalam satu tahun ke depan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, selain data hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ada juga data yang diperoleh langsung dari para pelaku wisata, pemerhati wisata dan masyarakat yang berdiam di sekitar objek wisata. Setelah melalui analisis dan pertimbangan yang matang, seluruh data dan informasi ini kemudian dirangkum dan ditetapkan berdasarkan urutan prioritasnya sebagai usulan program tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selanjutnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata usulan ini dibawa dalam Rapat Kerja Pembangunan Kota (RKPK). RKPK ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Banda Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Gorontalo Tahun Anggaran berjalan. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) merupakan dokumen perencanaan daerah yang berlaku untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Belanja Daerah. Sebagai dokumen resmi pemerintah, RKPK mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPK juga memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, arah dan kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah dan rencana prioritas pembangunan, termasuk di dalamnya gambaran tentang isu strategis serta masalah mendesak yang segera perlu ditangani dan diselesaikan.

Analisis terhadap kondisi terakhir pada tahun anggaran berjalan seperti yang disebutkan, merupakan faktor yang sangat penting. Kondisi ini paling tidak telah memberi gambaran dari hasil program-program yang telah dilaksanakan

sebelumnya. Di samping itu, kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikator penting untuk melihat adakah gambaran perubahan yang dapat diukur (measurable) dan dapat dilihat (observable). Jumlah kunjungan wisatawan, pembangunan infrastruktur pada objek-objek wisata dan tumbuhnya kelompok-kelompok sadar wisata kiranya dapat dijadikan sebagai ukuran dari adanya hasil program yang telah dilaksanakan. Faktor lain adalah pelaksanaan syariat Islam yang semakin baik juga dapat dijadikan sebagai ukuran telah berhasilnya sebuah program. Berkenaan dengan masalah tujuan, menurut Assifi dan French, penelitian terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program atau kegiatan harus jelas apa yang hendak dicapai.

Dengan demikian semua pihak mengerti apa yang akan dihasilkan oleh program. Dengan kata lain, semua orang mengetahui persis kemana arah perjalanan yang akan ditempuh. Hal senada juga dijelaskan dalam P-Proses, yaitu dalam menetapkan tujuan komunikasi harus spesifik, terukur, tepat, realistis, dan tepat waktu. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini adalah memilih bagian khalayak yang penting (legislator, pembuat kebijakan, pemimpin politik), Mengembangkan detail singkat strategi dalam kampanye (taktik), Menyusun rencana implementasi dan mengembangkan rencana evaluasi dan monitoring. Menurut Middleton perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan masalah yang dihadapi dan akhirnya merumuskan bagaimana keadaan masalah tersebut setelah program dilaksanakan. Penentuan tujuan harus spesifik supaya dengan jelas dan komprehensif bisa dilaksanakan. Kemudian tujuan dari sebuah program haruslah terukur apalagi saat dilakukan evaluasi. Kemudian tujuan harus bisa dijangkau dengan sumberdaya yang ada.

Tujuan kemudian harus realistis sesuai dengan waktu yang tersedia dan anggaran yang ada beserta sumber daya lainnya. Mengenai jangka waktu pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana pendapat Alan Hancock's tentang pengertian perencanaan komunikasi (dalam Middleton), dengan perencanaan komunikasi kita berarti menyiapkan rencana baik jangka panjang dan jangka pendek yaitu rencana strategis dan operasional untuk penggunaan sumber daya komunikasi yang efisien dan merata, dan untuk merealisasikan kebijakan komunikasi dalam konteks tujuan masyarakat tertentu, sarana dan prioritas, dan tunduk pada bentuk yang berlaku dalam organisasi sosial dan politik.

#### **4. Fasilitator**

Dalam tahap penyusunan program menurut Assifi dan French, perencanaan manajemen program diperlukan untuk dapat menjamin tercapainya tujuan komunikasi. Program harus melakukan pemantauan atas kegiatankegiatan komunikasi yang dilakukan sambil terus mengamati perubahanperubahan yang terjadi. Adanya perubahan situasi, dapat saja mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan komunikasi. Tanpa adanya mekanisme pemantauan dan pengelolaan informasi, program akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyusunan programprogram komunikasi yang sedang berjalan maupun program komunikasi yang akan datang. Demikian

juga dalam model perencanaan komunikasi, pendekatan komunikasi menekankan partisipasi, fleksibilitas, dan pelatihan yang maksimum. Pemantauan melibatkan hasil pelacakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung seperti yang direncanakan dan adanya potensi masalah yang segera ditangani. Bagian dari implementasi dan pemantauan ini antara lain adalah mengembangkan dan menerapkan rencana diseminasi yang mungkin termasuk pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, yang sesuai, dan media dengan jangkauan yang luas. Rencana pelatihan di semua tingkatan. menjaga semua orang terlibat termotivasi menuju tujuan strategis. mengelola dan memantau program dan menyesuaikan program berdasarkan pemantauan.

Menurut Middleton, analisis perencanaan dan pengembangan strategi disusun seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai objektif yang telah ditentukan. Strategi ini merupakan dasar dari taktik yang akan dibuat dalam setiap keadaan di lapangan. Oleh karenanya strategi harus mempertimbangan faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat yang mungkin terjadi. Untuk keberhasilan implementasi, beberapa hal yang umum dilakukan adalah melakukan lobby-lobby, silaturahmi, dan sosialisasi. Pembentukan sistem pengontrol di lapangan juga biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri. Dalam perspektif teori, *Middleton* mengemukakan terdapat empat bidang teori yang relevan dengan pendekatan perencanaan komunikasi, yaitu : teori pembangunan, teori sosiologi, teori komunikasi dan teori organisasi. Penekanannya adalah pada implikasi dari teori-teori ini untuk perencanaan, bagaimana dan mengapa mereka digunakan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini peran Dinas Pariwisata Gorontalo dalam pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19 dengan tersedianya wirausahawan (Operator) Koordinator, fasilitator dan stimulan masih terdapat kekurangan yang belum dilaksanakan oleh koordinator dan fasilitator dengan baik. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga budaya wisata yang layak di Gorontalo. Adapun Sarannya adalah bagi Pemerintah Kota Gorontalo Pelestarian Pariwisata di Gorontalo sangat membutuhkan peran pemerintah Gorontalo, Pemerintah Gorontalo harus lebih memperhatikan budaya pariwisata, karena wisata di Gorontalo unik dengan daerah Gorontalo. Pemerintah Gorontalo perlu meningkatkan kemauan masyarakat untuk mencintai dan lebih berprasangka baik terhadap warisan budaya dimanapun mereka berada. Pemerintah Gorontalo juga harus menetapkan program kegiatan yang berkaitan dengan konservasi pariwisata dan potensi pariwisata daerah Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunggio, S., & Ismail, S. D. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15–24.
- Fernando, H. (2016). *Sosial budaya dalam pariwisata . Tahun 2016*.
- Kamaludin, Arman, & Dunggio, S. (2021). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara The. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–17. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/article/view/16>
- Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Birokrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Public. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 34–49.
- Pangestuti, E. (2019). Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 2139.
- Perda Propinsi Gorontalo No 2. (2019). *Perda Propinsi Gorontalo No 2*.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- UU RI Nomor 10. (2009). *Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan*.